



► Ringkasan

Maret 2023

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

Poin-Poin Utama

- Dokumen ini mengulas secara singkat tentang mengapa dan bagaimana mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab.
- Sebagian besar penerima upah di dunia menerima upah mereka secara digital – seperti melalui rekening lembaga keuangan, kartu prabayar atau kartu gaji, atau uang elektronik. Namun, jutaan pekerja perempuan dan laki-laki banyak yang masih kekurangan akses ke pembayaran upah secara digital. Selain itu, pekerja yang telah dibayar secara digital mungkin masih belum mendapatkan manfaat penuh dari transisi tersebut.
- Pembayaran upah secara digital memberikan manfaat bagi pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, jika dirancang dan diterapkan secara bertanggung jawab. Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab akan berkontribusi pada usaha yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja perempuan dan laki-laki.
- Pembayaran upah, baik secara digital atau tunai, harus mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku, dan semua pelaku yang terlibat harus menghormati prinsip dan hak dasar di tempat kerja, hak asasi manusia lainnya, dan prinsip standar ketenagakerjaan internasional yang relevan.
- Dalam hal pembayaran upah digital, harus juga menghormati prinsip dan pedoman yang relevan, terutama mengenai pembayaran digital yang bertanggung jawab, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen
- Untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya dari pembayaran upah digital, isu-isu yang perlu dipertimbangkan meliputi: pilihan metode pembayaran digital, aksesibilitas dan jaminan pendapatan dan aset, transparansi dan privasi, kesempatan dan perlakuan yang adil, dan kondisi yang mendukung.

Mengapa pembayaran upah digital yang bertanggung jawab itu penting

Pembayaran upah digital tersebar luas, namun akses dan manfaatnya belum merata

Sebagian besar penerima upah di dunia menerima upah mereka secara digital – ke rekening lembaga keuangan, kartu prabayar atau kartu gaji, atau akun uang elektronik

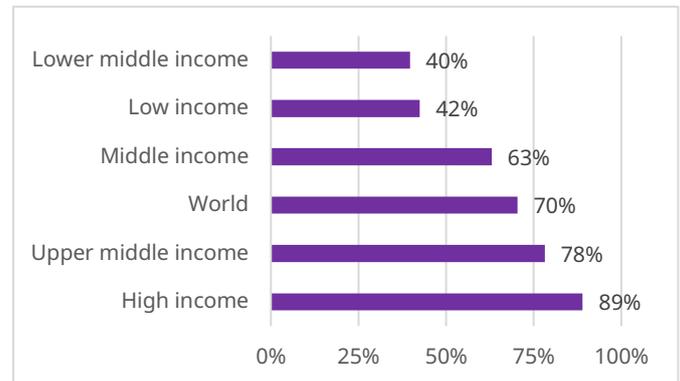
Pada tahun 2021, ada sebanyak 3,3 miliar orang yang memiliki pekerjaan (39 persen perempuan), termasuk 1,7 miliar pekerja dalam hubungan kerja (40 persen perempuan).¹ Upah dan alat pembayaran upah memiliki dampak langsung dan nyata pada kehidupan sehari-hari para pekerja.² Di seluruh dunia, pemberi kerja telah membayar pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan ataupun layanan yang diberikannya melalui pembayaran dalam bentuk tunai (non-uang), dalam bentuk uang kertas dan koin (tunai), melalui cek bank atau pos atau wesel, atau melalui sarana digital. Secara global, 70 persen penerima upah menerima upah mereka secara digital pada tahun 2021.³ Sementara itu, sekitar 165 juta pekerja yang tidak memiliki rekening bank, menerima upah mereka di sektor swasta, hanya dalam bentuk tunai.

Namun, akses ke pembayaran upah digital tidak terdistribusi secara merata

Penerima upah di negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi memiliki dua kali kemungkinan lebih tinggi menerima pembayaran upah digital dibandingkan rekan mereka di negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah,

prosentase penerima pembayaran upah digital masing-masing mewakili 40 persen dan 42 persen penerima upah, dibandingkan dengan di negara-negara berpenghasilan tinggi sebesar 89 persen.

► Penerima upah yang menerima pembayaran upah digital, menurut tingkat pendapatan ekonomi, 2021



Sumber: Demirgüç-Kunt et al. (2022).

Selain itu, pembayaran upah digital harus dirancang dan dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan pekerjaan layak.

Agar digitalisasi pembayaran upah dapat menguntungkan berbagai kategori pemberi kerja dan pekerja yang sejalan dengan agenda pekerjaan layak,⁴ risiko terkait harus diidentifikasi, dikaji, dan ditangani sebagaimana mestinya. Mengatasi penyebab mendasar dari risiko tersebut dapat melibatkan langkah-langkah guna memperkuat perlindungan upah dan perlindungan konsumen dalam hukum, kebijakan, dan praktik.

Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dapat berkontribusi pada perusahaan

¹Statistik dalam laporan ini mengacu pada orang berusia 15+. Statistik ketenagakerjaan global berasal dari estimasi model ILO, November 2021.

²Upah adalah remunerasi atau penghasilan, terlepas bagaimana ditentukan atau dihitung, dapat dinyatakan dalam bentuk uang dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama atau oleh undang-undang atau peraturan nasional, yang dapat dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja tertulis atau tidak tertulis oleh pemberi kerja kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan atau untuk layanan yang diberikan atau yang akan diberikan.

³Sumber statistik pembayaran upah digital dari: Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, dan Saniya Ansar. *Database Global Findex 2021: Inklusi Keuangan, Pembayaran Digital, dan Ketahanan di Era COVID-19*. Bank Dunia, 2022.

⁴Empat tujuan strategis yang tidak terpisahkan, saling terkait, dan saling mendukung merupakan inti dari agenda pekerjaan layak: (a) menetapkan dan mempromosikan standar dan prinsip serta hak dasar di tempat kerja; (b) menciptakan peluang yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak; (c) meningkatkan cakupan dan efektivitas perlindungan sosial untuk semua, dan; (d) memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja perempuan dan laki-laki

Pembayaran upah, baik digital atau lainnya, harus mematuhi undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku.⁵ Semua aktor yang terlibat harus menghormati prinsip dan hak dasar di tempat kerja,⁶ hak asasi manusia lainnya, dan prinsip standar ketenagakerjaan internasional yang relevan.⁷

▶ ILO dan perlindungan upah

Sejak awal, ILO telah mengadvokasi standar ketenagakerjaan yang berupaya menjamin dan melindungi hak-hak pekerja sehubungan dengan upah.

Konvensi Perlindungan Upah (No. 95) dan Rekomendasi (No. 85), 1949 adalah dua instrumen ketenagakerjaan internasional pertama yang membahas secara komprehensif aspek-aspek seperti bentuk dan cara pembayaran upah dan upaya untuk memberikan sepenuhnya kemungkinan perlindungan terhadap upah pekerja. Keduanya menangani:

- bentuk dan cara pembayaran upah
- kebebasan pekerja untuk mengatur upah mereka
- kewajiban informasi
- jaminan upah
- penegakan

Ketentuan yang memiliki relevansi langsung dengan perlindungan upah dimasukkan dalam instrumen ILO lainnya.

Dalam hal pembayaran upah digital, ini juga harus menghormati prinsip dan pedoman yang relevan, terutama mengenai pembayaran digital yang bertanggung jawab, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Prinsip PBB tentang Pembayaran Digital yang Bertanggung Jawab menetapkan siapa yang harus

bertanggung jawab, apa arti dari bertanggung jawab, dan bagaimana menjadi bertanggung jawab.

▶ Prinsip PBB untuk Pembayaran Digital yang Bertanggung Jawab

1. Memperlakukan pengguna dengan adil
2. Memastikan dana dilindungi dan dapat diakses
3. Mengutamakan perempuan
4. Menjaga data nasabah
5. Desain untuk individu
6. Bersikap transparan, terutama dalam hal harga
7. Memberikan pilihan pengguna melalui interoperabilitas
8. Menyediakan jalan keluar yang jelas, cepat dan responsif
9. Memperjuangkan akuntabilitas rantai nilai

Upah digital yang bertanggung jawab dapat berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab relevan untuk beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Tujuan 1 (tak ada kemiskinan), 5 (kesetaraan gender), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), 10 (mengurangi ketimpangan), dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat).

⁵ Adanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja merupakan sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi *Seabad ILO untuk Masa Depan Pekerjaan* dan *seruan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada orang yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap krisis Covid 19*.

⁶ Prinsip dan hak dasar di tempat kerja adalah: kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan pekerja anak secara efektif; penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; dan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

⁷ Standar ketenagakerjaan internasional adalah instrumen hukum yang dibuat oleh konstituen ILO (pemerintah, pengusaha dan pekerja) dan menetapkan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja. Ini adalah Konvensi (atau Protokol), yang merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang dapat diratifikasi oleh negara-negara anggota, atau Rekomendasi, yang berfungsi sebagai pedoman yang tidak mengikat.



Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dapat memberikan potensi manfaat bagi pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Ini dalam kasus ideal, di mana tantangan, risiko, dan biaya telah ditangani secara memadai. Bagian berikut membahas isu-isu yang perlu dipertimbangkan untuk membuat potensi manfaat menjadi kenyataan.

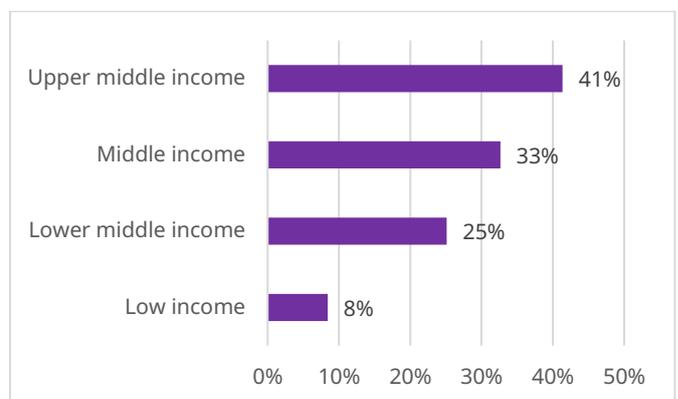
Potensi manfaat bagi pekerja perempuan dan laki-laki

- *Formalisasi dan perluasan perlindungan jaminan sosial:* Pembayaran upah digital menyediakan catatan transaksi antara pemberi kerja dan pekerja, yang dapat digunakan untuk memberikan bukti adanya hubungan kerja, misalnya dengan mendokumentasikan pembayaran upah berkala kepada pekerja. Upah digital juga dapat membantu meningkatkan akses ke jaminan sosial: catatan transaksi dapat digunakan untuk mendaftarkan pekerja dalam skema jaminan sosial dan, ketika pembayaran sepenuhnya dilakukan secara digital, ini akan membantu menghindari upah tidak terlaporkan. Catatan terkait juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat.
- *Perlindungan upah :* Pembayaran upah digital memungkinkan pekerja menerima gaji mereka secara otomatis, penuh, dan tepat waktu, bahkan jika mereka tidak masuk kerja pada hari gajian. Transparansi yang diberikan oleh pembayaran upah digital juga dapat membantu menghindari pemotongan yang sewenang-wenang, tidak adil, atau Potongan-potongan yang tidak diberitahukan sebelumnya. Pekerja menerima bukti pembayaran upah, di samping slip gaji yang harus diberikan pemberi kerja, dapat digunakan jika terjadi kesalahan atau perselisihan dengan pemberi kerja atau penyedia jasa keuangan. Selain itu, upah digital yang akurat dapat membantu menghindari pembayaran

untuk potongan-potongan yang demikian yang dapat terjadi ketika dibayar tunai dan pecahan dengan nominal kecil uang kertas tidak tersedia. Ini juga menghindari risiko menerima uang kertas rusak atau palsu yang ada dengan pembayaran tunai. Menerima upah secara digital lebih aman daripada membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang mungkin hilang atau dicuri. Pembayaran upah digital juga lebih aman daripada cek, yang mungkin kurang disukai. Perlindungan PIN, perlindungan lain terhadap penipuan, mekanisme bantuan yang efektif, dan asuransi simpanan memberikan perlindungan tambahan. Dengan adanya perlindungan seperti itu, pekerja yang dibayar secara digital dapat lebih terlindungi dari kebangkrutan pemberi kerja atau penyedia jasa keuangan.

- *Akses ke jasa keuangan formal yang sesuai :* Dengan adanya kesempatan untuk menerima upah secara digital, pekerja yang sebelumnya dikecualikan, khususnya perempuan, dapat memperoleh akses ke rekening bank. Penerima upah digital dapat mengembangkan hubungan dengan penyedia jasa keuangan, yang dapat membantu membangun kepercayaan dan riwayat transaksi. Penyedia jasa keuangan dapat memanfaatkan mereka untuk membuat keputusan terkait dengan pekerja dan menawarkan solusi yang memenuhi kebutuhan dan sarana mereka. Selain itu, pekerja dapat lebih mudah mengakses jasa keuangan formal seperti tabungan, kredit, pengiriman uang, dan asuransi, antara lain untuk ketahanan dan peluang ekonomi yang lebih baik.

► **Jumlah populasi dari mereka yang membuka rekening pertama mereka di lembaga keuangan tertentu untuk menerima pembayaran gaji, 2021**



Sumber: Demirgüç-Kunt et al. (2022).

- *Kontrol yang lebih baik atas waktu dan uang:* Pekerja dapat menerima gaji mereka tanpa harus menunggu cek atau harus mengantri untuk menerima gaji mereka

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

secara tunai. Hal ini dimungkinkan ketika tempat-tempat transaksi setoran dan tarik tunai (CICO), seperti ATM, cabang bank, atau agen bank atau mobile money, dapat diakses dengan mudah dan aman. Pekerja yang memiliki kapasitas digital dan keuangan yang memadai dapat memeriksa saldo mereka, memantau pengeluaran mereka, dan mengaturnya sesuai dengan prioritas mereka. Jasa keuangan inklusif dapat memberdayakan pekerja untuk menarik uang tunai saat mereka membutuhkannya. Pekerja, khususnya pekerja perempuan yang rentan, dengan demikian dapat memiliki kendali yang lebih baik titik setor dan tarik tunai (cash-in&cash upah mereka dan memiliki kesempatan untuk merencanakan dengan lebih baik bagaimana mengelola keuangan mereka. Manfaat ini dioptimalkan ketika pekerja dapat mengakses rekening keuangan atau kartu mereka kapan pun mereka mau. Ketika upah digital diterapkan secara inklusif, adil, dan tanggap gender, risiko kekerasan dan pelecehan terkait upah dapat dikurangi.

► Studi kasus: Bangladesh

Bangladesh adalah pengeksport garmen terbesar kedua di dunia. Penelitian oleh Aliansi Better than Cash –Bank Dunia memperkirakan bahwa rata-rata pabrik dengan 2.500 pekerja kehilangan 750 jam produksi per bulan ketika membayar upah secara tunai. Sebaliknya, ketika penggajian didigitalkan, pabrik garmen mencatat penghematan waktu staf admin dan keuangan sebesar 53%. Pendekatan yang bertanggung jawab terhadap digitalisasi upah meningkatkan kemungkinan perempuan, yang mewakili mayoritas [80% pada tahun 2017] dari tenaga kerja garmen di Bangladesh, untuk berpartisipasi dalam keputusan rumah tangga terkait pengeluaran dan tabungan sebesar 15%.

Sumber: Better Than Cash Alliance. *Digitizing Wage Payments in Bangladesh's Garment Production Sector*. 2017

Potensi manfaat bagi perusahaan

- *Peningkatan produktivitas dan penghematan biaya* : Kepuasan pekerja yang lebih besar dan efektivitas biaya dapat meningkatkan produktivitas, karena lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan menerima pembayaran upah. Manfaat ini dioptimalkan saat pekerja dapat mengakses dan menggunakan upah digital mereka dengan cepat, mudah, terjangkau, dan saat dibutuhkan. Keuntungan produktivitas seperti itu mungkin ada bahkan jika pembayaran digital tidak

memberikan penghematan biaya secara langsung. Pembayaran upah secara digital juga dapat menurunkan biaya proses pembayaran upah, termasuk biaya penghitungan dan pendistribusian upah kepada pekerja, serta mengurangi biaya pengangkutan uang tunai dan menjaga keamanannya (petugas keamanan, asuransi).

- *Akurasi* : Kesalahan manusia dapat dikurangi saat memproses pembayaran upah digital dibandingkan dengan yang berbasis kertas, sehingga meningkatkan akurasi pembayaran upah. Pemberi kerja dapat menggunakan pembayaran digital dan catatan pembayarannya untuk keperluan pajak dan jaminan sosial dan sebagai bukti jika terjadi kesalahan atau perselisihan. Hal ini juga berlaku untuk rumah tangga yang mempekerjakan pekerja rumah tangga.

► Studi kasus: Kamboja

Potensi penghematan dari digitalisasi upah untuk dua pabrik garmen		
Karakteristik Pabrik	Pabrik besar dengan pekerja tetap	Pabrik yang lebih kecil dengan pekerja tetap dan temporer
Jumlah pekerja	2,000 (85% perempuan)	885 (85% perempuan) (677 permanen, 208 temporer)
Aliran keluar gaji bulanan	\$500,000	\$221,250
Total penghematan per pekerja/per bulan	\$0.85	\$1.40 (per pekerja dibayar secara digital)
Total penghematan per bulan	\$1,700	\$1,116 (berdasarkan 797 pekerja yang dibayar secara digital)
Titik impas (BEP)	Dibawah 4 bulan	Dibawah 9 bulan

Sumber: BSR HERProject et al. *The potential gains of digitizing garment sector wages in Cambodia*. 2022.

- *Keamanan* : Risiko kehilangan dan pencurian yang terkait dengan pengelolaan uang tunai atau cek dalam bentuk kertas dalam jumlah besar dapat dikurangi saat menggunakan solusi pembayaran digital yang andal. Selain itu, risiko penggunaan uang kertas rusak atau palsu juga dapat dikurangi.
- *Akses ke keuangan* : Mencairkan upah secara digital dapat berkontribusi untuk mengembangkan hubungan perusahaan dengan penyedia jasa keuangannya, membangun kepercayaan dan riwayat transaksi yang dapat digunakan penyedia jasa keuangan dalam membuat keputusan terkait dengan perusahaan dan menawarkan solusi yang memenuhi kebutuhannya.
- *Akses ke pasar* : Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dapat memberi sinyal kepada

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

pelanggan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan berkomitmen pada praktik yang bertanggung jawab secara umum. Ini juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan pelanggan dan lembaga sertifikasi, serta memfasilitasi akses ke pengadaan publik.

- **Formalisasi** : Tergantung pada keadaan nasional, pembayaran upah secara digital dapat digunakan di antara kriteria operasional untuk menentukan status formalitas perusahaan. Selain itu, pembayaran upah digital dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan dan memperkuat rekam jejak keuangan mereka, berkontribusi pada transisi ke ekonomi formal. Ini juga dapat membantu perusahaan mengakses program bantuan langsung dan tidak langsung yang disediakan oleh pemerintah.

► Studi kasus: Yordania

Sektor garmen mempekerjakan lebih dari 76.000 orang atau 9 persen dari total tenaga kerja sektor swasta dewasa di Yordania yang 73 persen di antaranya adalah perempuan. Tiga perusahaan Yordania yang mewakili 12 persen dari total pekerja sektor membuktikan manfaat signifikan dari pembayaran upah digital yang bertanggung jawab kepada pekerja mereka sejalan dengan prinsip-prinsip PBB untuk pembayaran digital yang bertanggung jawab : waktu administrasi untuk mencairkan upah turun sebesar 66 persen terkait setoran yang dilakukan langsung ke rekening bank, dan sebesar 70 persen untuk pembayaran yang dilakukan langsung ke dompet elektronik. Data juga menunjukkan bahwa pencairan upah secara tunai bisa setara dengan upah bulanan 4,4 pekerja.

Source : Better Than Cash Alliance, Better Work, ILO, GIZ. *Promoting decent work by digitizing wages responsibly in Jordan.* 2021

Potensi manfaat bagi pemerintah

- **Manfaat umum untuk sektor publik dan pekerjanya**: Entitas dan pekerja sektor publik dapat memperoleh manfaat dari pembayaran upah digital yang serupa dengan entitas dan pekerja lainnya.
- **Kepatuhan** : Transparansi yang diberikan oleh pembayaran upah digital dapat mendukung otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan diterapkan secara memadai, termasuk yang terkait dengan upah dan perlindungan konsumen. Ini terutama dapat membantu administrasi tenaga kerja dan otoritas pengawasan untuk mendeteksi dan

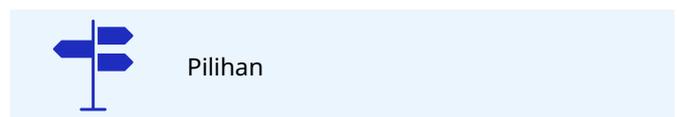
mengantisipasi situasi di mana upah dan iuran jaminan sosial wajib mungkin tidak dibayarkan secara penuh dan atau tepat waktu, sehingga dapat mendukung pengawasan langsung ke perusahaan (on-site).

- **Formalisasi** : Catatan pembayaran upah digital menyediakan data yang dapat diproses secara terkoordinasi dan kooperatif di berbagai tingkat pemerintahan dan badan terkait, dan pihak berwenang dapat membantu mempromosikan transisi perusahaan dan pekerja dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Lebih lanjut, ini juga dapat memungkinkan pihak berwenang untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pajak dan penggelapan jaminan sosial dengan lebih baik.
- **Promosi ketenagakerjaan**: Kondisi yang mendukung untuk pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dan catatan yang dihasilkan oleh pembayaran tersebut juga dapat memfasilitasi langkah-langkah promosi ketenagakerjaan seperti fasilitas pinjaman khusus, subsidi temporer, atau konsesi pajak temporer.
- **Perlindungan sosial** : Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dapat memfasilitasi kontribusi dan pencairan tunjangan jaminan sosial, BLT, dukungan untuk pendapatan, dan subsidi upah melalui sarana digital yang bertanggung jawab.
- **Pencegahan dan penyelesaian perselisihan** : Dalam kasus perselisihan antara pengusaha dan pekerja mengenai upah atau antara pengusaha dan pekerja dan penyedia jasa keuangannya, catatan pembayaran digital dapat menjadi sumber bukti yang dapat digunakan pihak berwenang dalam mengadili.

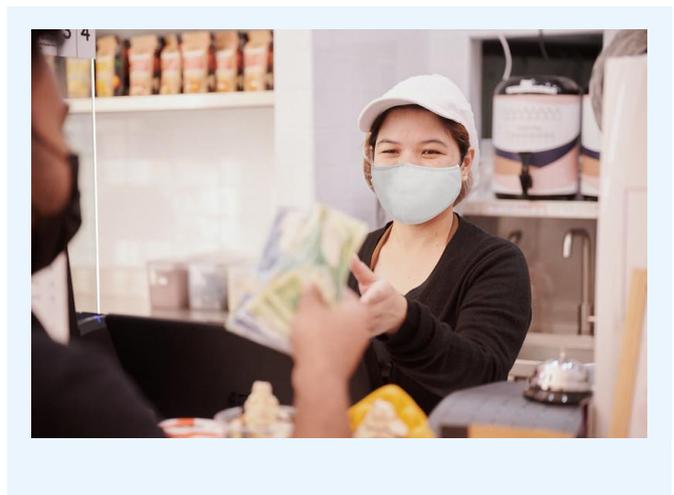
Isu yang dipertimbangkan dalam mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

Untuk mendapatkan manfaat penuh dari pembayaran upah digital, perusahaan, pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, penyedia jasa keuangan, mitra pembangunan harus mempertimbangkan sejumlah masalah saat menerapkan pembayaran upah digital. Isu-isu yang perlu dipertimbangkan termasuk isu-isu pilihan, aksesibilitas dan keamanan pendapatan dan aset, transparansi dan privasi, kesempatan dan perlakuan yang adil, dan kondisi yang memungkinkan (lihat di bawah).

► Isu yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan pembayaran upah digital



- Aksesibilitas dan keamanan pendapatan dan aset
- Transparansi dan privasi
- Kesempatan dan perlakuan yang adil
- Kondisi yang mendukung



Pilihan

Pilihan alat pembayaran upah digital

Pilihan sarana pembayaran upah digital dapat terjadi pada tingkat yang berbeda, seperti tingkat publik (undang-undang atau peraturan), kolektif (perjanjian kerja bersama), arbitrase (putusan arbitrase), atau individu (persetujuan pekerja yang bersangkutan).

Tingkat perusahaan memberikan landasan penting untuk keberhasilan implementasi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab.⁸ Ini memungkinkan pekerja untuk mengomunikasikan kebutuhan dan permasalahan mereka. Ini juga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan pemahaman pekerja tentang kebutuhan dan tujuan perusahaan serta kondisi pasar. Dengan demikian, hal ini dapat membantu membentuk pendekatan bersama terhadap transisi ini dan memastikan pembagian keuntungan yang adil.

Pilihan penyedia jasa keuangan

Langkah-langkah yang diperlukan harus dilakukan untuk menjamin bahwa para pekerja dapat, jika mereka menginginkannya, memilih penyedia jasa keuangan di mana pemberi kerja menyetorkan upah mereka.

Pilihan produk dan jasa keuangan

Pengusaha dan pekerja harus memiliki kesempatan untuk mencari, membandingkan dan, jika perlu, beralih antara produk dan penyedia dengan mudah dan dengan biaya yang wajar dan terbuka.

Aksesibilitas dan keamanan pendapatan dan aset

Bentuk, kecukupan, ketepatan waktu, dan kelengkapan pembayaran upah digital upah

Upah, apakah dibayar secara digital atau dengan cara lainnya, harus dibayar hanya dengan alat pembayaran yang sah. Pembayaran dengan bentuk surat promes, voucher, kupon, token lainnya, atau dalam bentuk lain yang dianggap mewakili alat pembayaran yang sah, harus dilarang.⁹

Pekerja harus menerima upah minimum yang memadai, menurut undang-undang atau hasil perundingan, dengan mempertimbangkan biaya apa pun yang mungkin timbul dari menerima dan mengakses pembayaran upah digital.

Upah harus dibayar secara teratur dengan selang waktu sedemikian rupa sehingga meminimalkan kemungkinan pekerja terjerat utang.

Jaminan upah harus dirancang untuk memastikan pembayaran total upah yang jatuh tempo dan melindungi pekerja dari pengurangan remunerasi yang sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak terduga, terutama melalui biaya perekrutan, pemotongan berlebihan atau instruksi-instruksi lainnya, atau karena penutupan perusahaan yang bangkrut.

Dalam hal pembayaran upah digital, langkah-langkah yang diambil juga harus memastikan bahwa pekerja berhak untuk menyimpan dokumen identitas mereka, alat

⁸ Dialog sosial tingkat perusahaan mencakup semua jenis negosiasi, konsultasi dan pertukaran informasi antara manajemen dan perwakilan pekerja di dalam perusahaan

⁹ Di hampir semua negara mata uang kripto belum diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Pengecualian di dua negara mulai 1 Mei 2022 di El Salvador dan Republik Afrika Tengah di mana Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

pembayaran seperti kartu ATM atau ponsel, informasi pribadi seperti kata sandi dan PIN yang terkait dengan alat pembayaran, dan lainnya, dokumen yang terkait dengan akun mereka.

Kesesuaian jasa keuangan dengan kebutuhan dan sarana pengusaha dan pekerja

Pengusaha dan pekerja harus memiliki cara yang terjangkau dan nyaman untuk memahami, mengakses, menggunakan, dan menarik dana mereka sesuai permintaan. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk mengakses jumlah penuh dari upah mereka. Sementara jasa keuangan yang berbeda bervariasi dalam biaya yang dikenakan, ketersediaan solusi berbiaya rendah akan menjawab kebutuhan dan sarana pekerja yang rentan dan kurang diuntungkan.

Penyedia jasa keuangan harus melibatkan otoritas yang berwenang dan organisasi pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan solusi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dan jasa keuangan lainnya yang memfasilitasi pengadopsian dan penggunaannya oleh pengusaha dan pekerja.

► Studi kasus: Uni Emirat Arab

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emirati telah mengeluarkan kartu ID bank multi guna cerdas untuk pekerja rumah tangga dengan berbagai fitur, termasuk berfungsi sebagai dompet elektronik. Kartu tersebut juga menyediakan sistem otomatis baru untuk memantau transaksi transfer untuk memastikan bahwa upah pekerja rumah tangga terlindungi dan untuk mentransfer upah dengan cepat sambil memastikan kerahasiaan.

Dalam mengembangkan solusi tersebut, pertimbangan harus diberikan untuk mendorong tabungan sukarela, memfasilitasi pengiriman uang, mengurangi biaya rekening dan transaksi, mencegah hutang berlebih, melindungi terhadap riba, dan mendorong investasi yang sehat.

Perlindungan kepada perusahaan dan pekerja atas aset keuangan terhadap penipuan, penyalahgunaan, dan kebangkrutan

Mekanisme informasi, akses/kendali, dan perlindungan yang relevan harus dikembangkan dan diterapkan untuk melindungi upah digital bagi pekerja, serta setoran, tabungan, dan aset keuangan serupa lainnya dari pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal terjadi kebangkrutan penyedia jasa keuangan, aset keuangan pengusaha dan

pekerja harus dilindungi, misalnya melalui sistem penjaminan simpanan nasional.

Transparansi dan Privasi

Kesesuaian dan pemahaman informasi bagi pekerja tentang upah mereka

Pekerja harus menerima informasi tersebut sebelum mereka memasuki pekerjaan, ketika terjadi perubahan, dan pada saat setiap menerima pembayaran upah digital. Saat membayar upah secara digital, pemberi kerja harus memberikan rincian pernyataan gaji (slip gaji) kepada pekerja, baik secara digital atau berbasis kertas, untuk periode pembayaran yang bersangkutan, termasuk: (a) jumlah upah kotor yang diperoleh; (b) alasan dan jumlah pengurangan yang mungkin telah dilakukan; dan (c) jumlah upah bersih yang dibayarkan. Pemberi kerja harus menyimpan catatan penggajian yang menunjukkan, sehubungan dengan setiap pekerja yang dipekerjakan, hal-hal khusus yang disebutkan di atas.

Kelengkapan, keakuratan, dan informasi tidak menyesatkan bagi pemberi kerja dan pekerja terkait jasa keuangan

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab terlaksana ketika penyedia jasa keuangan memberikan informasi yang tepat tentang manfaat, biaya dan risiko jasa dan produk keuangan di semua tingkatan hubungan dengan pemberi kerja dan juga pekerja. Disamping itu, semua materi keuangan, promosi harus akurat, dapat dipahami, dan tidak menyesatkan.

Pemberi kerja dan pekerja harus diberitahu tentang jumlah yang akan dibebankan kepada mereka atas jasa keuangan yang akan digunakan (jika ada), ketika membuka rekening, melakukan atau menerima pembayaran, biaya pemeliharaan rekening, biaya terkait pembaruan layanan bank atau kartu pembayaran, termasuk kasus kehilangan, pencurian atau kerusakan, pencairan, dan pemutusan hubungan dengan penyedia jasa keuangan, termasuk dalam hal perpajakan. Pemberi kerja harus diberi informasi yang memadai tentang manfaat, biaya, dan risiko solusi pembayaran upah digital dan jasa keuangan terkait untuk mereka dan pekerjanya. Mereka harus memberi tahu pekerja mereka terlebih dahulu tentang semua informasi yang relevan mengenai berbagai metode pembayaran yang tersedia serta kemungkinan perubahan dalam solusi yang digunakan.

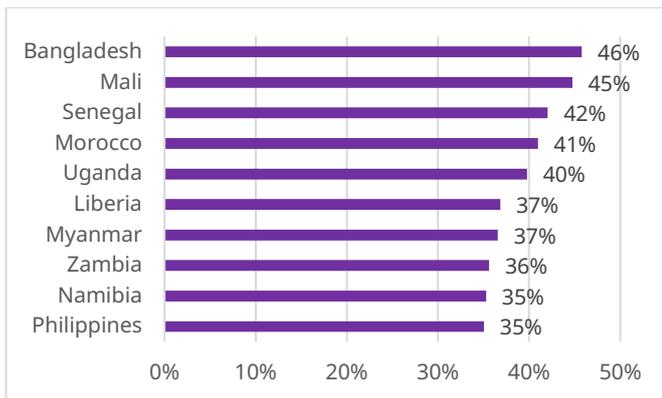
Selain itu, pemberi kerja dan pekerja yang melakukan atau menerima pembayaran upah secara digital harus

► ILO Brief

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

menerima laporan transaksi keuangan rekening dan pemberitahuan transaksi yang akurat dan terkini dari penyedia jasa keuangan.

► Negara-negara dengan jumlah penerima pembayaran upah digital tertinggi yang dilaporkan membayar biaya lebih tinggi daripada yang diharapkan untuk menerima upah mereka, 2021



Sumber: Demirgüç-Kunt et al. (2022).

Perlindungan data dan privasi pemberi kerja dan pekerja

Pemrosesan data pekerja harus dilakukan dengan cara yang melindungi data, menghormati kerahasiaan, dan memastikan penghormatan terhadap privasi pekerja.¹⁰ Informasi keuangan dan pribadi pemberi kerja dan pekerja harus dilindungi melalui mekanisme kontrol dan perlindungan yang tepat. Perlindungan yang memadai harus tersedia untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan sejalan dengan hak asasi manusia.

Kesempatan dan perlakuan yang adil

Kesetaraan atas kesempatan dan perlakuan bagi semua pekerja

Pembayaran upah digital harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang mempromosikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, non-diskriminasi, keseimbangan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Selain itu, data pembayaran upah digital dapat berkontribusi untuk memantau kesetaraan upah.

► Studi Kasus: Yordania

Pembayaran upah digital dapat berkontribusi untuk mengatasi kesenjangan upah antar gender. Komite Nasional Kesetaraan Upah, dibentuk dengan dukungan ILO pada tahun 2011, meluncurkan kampanye *Stand-up with the Teacher* pada tahun 2015. Selanjutnya, Asosiasi Pemilik Sekolah Swasta dan Serikat Pekerja Pendidikan Swasta menandatangani perjanjian kerja bersama sektoral yang mengatur persoalan kesenjangan upah antar gender, termasuk pembayaran upah melalui transfer bank. Ini menuntun pada dibuatnya Peraturan Pendaftaran dan Perizinan Sekolah Swasta dan Internasional. Di bawah Regulasi ini, pendaftaran dan perizinan sekolah-sekolah ini bergantung pada pembayaran upah/gaji melalui transfer bank atau dompet elektronik, berkoordinasi dengan Bank Sentral Yordania.

Kesetaraan akses dan perlakuan terhadap pengusaha dan pekerja sebagai konsumen keuangan

Pemberi kerja dan pekerja harus diperlakukan secara setara, jujur, dan adil di semua tahap hubungan mereka dengan penyedia jasa keuangan dan perwakilannya.

Efektivitas sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa

Sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa harus dapat diakses, mencari konsensus, adil, tidak memihak, transparan, sederhana, cepat, murah, dan memiliki keahlian yang diperlukan. Mekanisme pengaduan yang relevan dapat mencakup mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah, perusahaan, atau penyedia jasa keuangan.

¹⁰ See Hendrickx, F. 2022. *Protection of workers' personal data: General principles*, ILO Working Paper 62 (Geneva, ILO).



Kondisi yang Mendukung

Lingkungan kebijakan, hukum, peraturan, dan pengawasan yang kondusif serta ketergantungan pada dialog sosial

Pemerintah, berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, dan, jika sesuai, dengan organisasi terkait lainnya, harus terlibat dalam dialog sosial inklusif gender untuk memastikan pengembangan dan penerapan kebijakan, hukum, dan peraturan, untuk mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab. Proses dialog sosial dapat digunakan untuk mempertimbangkan apa arti pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dalam konteks tertentu, mengidentifikasi kebutuhan dan perhatian prioritas dari pemangku kepentingan utama, mengintegrasikan masalah ke dalam kebijakan dan strategi terkait atau mengembangkan rencana aksi yang sesuai konteks, mengembangkan mekanisme koordinasi sesuai kebutuhan, dan tentukan cara memantau kemajuan. Selain itu, lembaga pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas tentang pembayaran upah digital yang bertanggung jawab untuk memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam dialog sosial tentang masalah tersebut.

Persaingan yang adil dan efektif dapat membantu memberi pengusaha dan pekerja berbagai pilihan terbesar di antara produk dan jasa keuangan dengan biaya terendah. Promosi pendekatan digital untuk inklusi keuangan harus menyeimbangkan inovasi dan risiko. Sistem perlindungan upah dan perlindungan konsumen keuangan harus diperkuat untuk memantau, mencegah, dan mengatasi ketidakpatuhan secara efektif. Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan kelompok penduduk dan individu dalam situasi rentan. Koordinasi

dan kerja sama harus dipastikan di berbagai tingkat pemerintahan dan badan serta otoritas terkait.

► Studi Kasus: Filipina

Labour Advisory No. 26 Tahun 2020 tentang Pembayaran upah dan tunjangan uang lainnya melalui rekening transaksi sangat mendorong pengusaha untuk mengeksplorasi atau melakukan inisiatif seperti untuk: mengkomunikasikan kepada pekerja manfaat menerima upah secara digital; membantu pekerja yang membutuhkannya untuk membuka rekening; menawarkan pekerja opsi untuk menerima upah mereka secara digital jika memungkinkan; mewajibkan mitra penyedia jasa keuangan untuk memberikan informasi yang memadai kepada pekerja; memastikan bahwa pembukaan, pemeliharaan, dan penggunaan rekening tidak mengakibatkan tambahan pengeluaran/biaya atau pengurangan upah dan tunjangan uang lainnya yang diterima oleh pekerja; memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan upah; dan, menerbitkan kepada pekerja sebuah slip gaji atau catatan pembayaran upah dan tunjangan uang lainnya serta pemotongan untuk periode tertentu.

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab harus dipertimbangkan dalam desain dan implementasi kerangka kerja kebijakan terpadu untuk memfasilitasi transisi pekerja perempuan dan laki-laki dan perusahaan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Pendekatan yang disesuaikan mungkin diperlukan untuk mengatasi keragaman karakteristik, keadaan dan kebutuhan para pekerja dan perusahaan.

Pengembangan kapasitas mungkin perlu diberikan kepada penyedia jasa keuangan tentang solusi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dan jasa keuangan terkait yang memenuhi beragam kebutuhan dan sarana pemberi kerja dan pekerja dengan cara yang responsif gender.

► Studi kasus: Bangladesh

Menurut Pemerintah, dalam menanggapi COVID-19, penyedia jasa keuangan seluler / *Mobile Financial Service* (MFS) diinstruksikan untuk membuka dompet MFS baru untuk pekerja yang tidak memiliki rekening bank atau dompet MFS efektif mulai 20 April 2020. Hampir 2,2 juta dompet MFS dibuka setelah instruksi dikeluarkan, yang membuat jumlah akun menjadi hampir 3,8 juta. Penyedia diinstruksikan untuk menjaga agar poin agen tetap terbuka, aktif dengan uang tunai yang cukup

untuk melayani kebutuhan pekerja. Biaya setor sampai tarik tunai gaji berkurang menjadi 0,8 persen dari 1,85 persen.

Sumber: Bangladesh Bank, *Policy Measures of Bangladesh Bank in Response to the COVID-19 Pandemic (January 2021)*.

Kesiapan Infrastruktur

Infrastruktur yang kurang berkembang atau pembatasan penarikan tunai dapat menghambat kebebasan pekerja untuk mengakses dan menggunakan gaji digital mereka sesuai pilihan mereka. Pertimbangan harus diberikan pada ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendukung, termasuk akses ke energi yang andal, telekomunikasi, dan infrastruktur fisik.

Infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran yang memadai dengan interoperabilitas antara penyedia, termasuk lembaga keuangan dan penyedia uang seluler dan jaringan point akses fisik mungkin perlu diperluas untuk penyediaan jasa keuangan digital yang aman, andal, dan berbiaya rendah. Semua wilayah geografis yang relevan, terutama daerah pedesaan yang kurang terlayani.

Sistem identifikasi yang dapat diakses, terjangkau, dan dapat diverifikasi mungkin perlu dikembangkan untuk membantu memfasilitasi transisi ke pembayaran upah digital.¹¹

Kapasitas perusahaan dan pekerja dalam pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

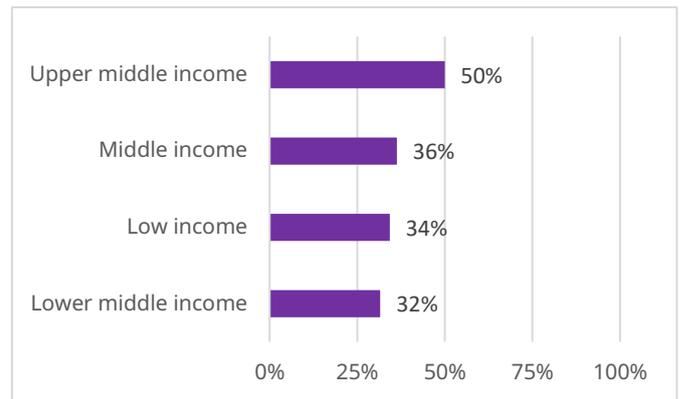
Pemberi kerja yang membutuhkan bantuan harus memiliki akses ke pengembangan kapasitas dukungan untuk menerapkan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab.

Selain itu, pekerja yang membutuhkannya harus memiliki akses ke pelatihan, saran, dan bantuan tentang cara mengakses upah mereka secara digital dan mengelola keuangan mereka secara digital, termasuk yang berkaitan dengan literasi, numerasi, literasi keuangan, dan literasi digital.

Perhatian khusus harus diberikan pada situasi orang-orang dengan kebutuhan khusus yang teridentifikasi secara nasional, seperti perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, migran, etnis minoritas, dan masyarakat adat.

Lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi pengusaha dan pekerja, penyedia jasa keuangan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan dukungan pengembangan kapasitas bagi perusahaan dan pekerja.

Jumlah populasi tanpa rekening yang dapat menggunakan rekening di bank atau lembaga keuangan tanpa bantuan jika mereka membukanya, berdasarkan tingkat pendapatan perekonomian, 2021



Sumber: Demirgüç-Kunt et al. (2022).

Secara khusus, organisasi pengusaha dan pekerja berada di posisi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan penerimaan anggota mereka tentang pembayaran upah digital yang bertanggung jawab. Organisasi pengusaha dapat meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penerimaan anggotanya melalui demonstrasi kasus bisnis, berbagi praktik yang baik, dan bernegosiasi dengan penyedia layanan penggajian dan keuangan. Mereka juga dapat mendukung pengembangan kapasitas anggota mereka tentang bagaimana menerapkan digitalisasi upah yang bertanggung jawab. Organisasi pekerja dapat membantu memastikan bahwa pembayaran upah digital bertanggung jawab dan bahwa pekerja dikonsultasikan secara efektif dalam hal itu, sejak tahap paling awal transisi. Pemangku kepentingan lainnya juga dapat berkontribusi. Misalnya, pelanggan dapat mendukung pengembangan kapasitas pemasok mereka dalam pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

Kesimpulannya, mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dengan cara yang inklusif, koheren, terintegrasi, dan responsive gender yang secara memadai mengatasi masalah yang menjadi perhatian dapat membantu mewujudkan potensi manfaat

¹¹ Menurut Bank Dunia, diperkirakan 1 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki [dokumen identitas](#) dasar pada tahun 2018

Mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

dan memajukan keadilan sosial, pekerjaan yang layak, dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.

Pusat Global Upah Digital untuk Pekerjaan Layak adalah prakarsa dari [ILO's Social Finance Programme](#).

Rincian Kontak

International Labour Organization

Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
T: +41 22 799 7239
E: digitalwages@ilo.org
www.digitalwages.org

**ILO Country Office for Indonesia
and Timor-Leste**

Menara Thamrin Level 22
Jalan MH Thamrin Kav 3
Jakarta,
Indonesia 10250
T: +62 21 3913112
E: jakarta@ilo.org
ilo.org/jakarta